



Imbal Jasa Lingkungan Perhutanan sosial mendukung capaian NDC Indonesia

Emmy Primadona



Model pengembangan imbal jasa lingkungan case study Bujang Raba



01

Perhutanan Sosial
dalam mereduksi
emisi karbon.

02

Penyelenggaraan
imbal jasa
lingkungan

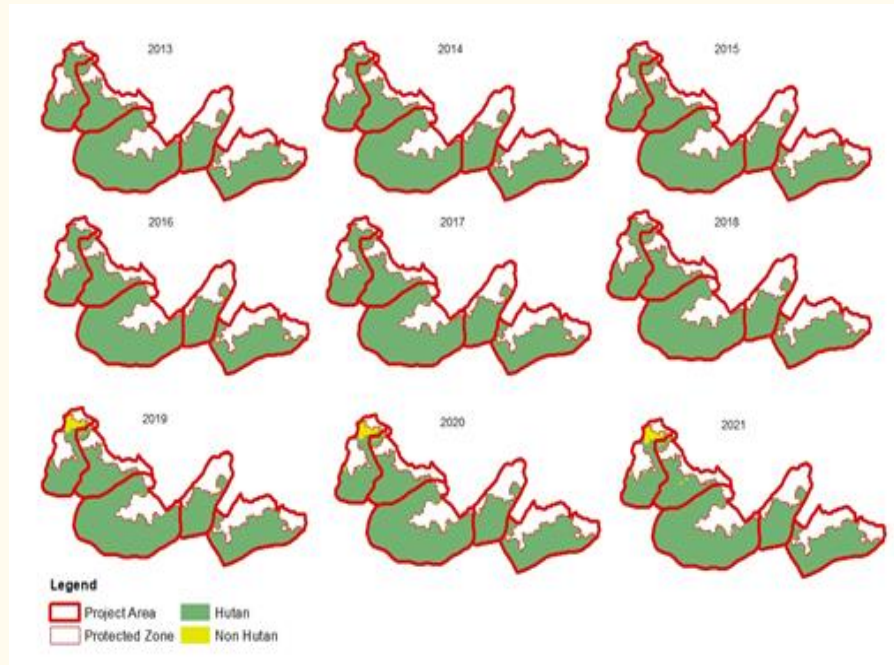
03

Pemanfaatan jasa
lingkungan atas
karbon



Kontribusi Perhutanan Sosial dalam mereduksi emisi karbon.

- Tenure right jelas, 35 tahun dan bisa diperpanjang
- Secara regulasi memiliki skema pemanfaatan jasa lingkungan terhadap penyimpanan dan /atau penyerapan atas karbon sebagaimana diatur dalam PP 23 Tahun 2021 dan Permen LHK No 9 tahun 2021
- Banyak contoh baik dilapangan membuktikan Perhutanan sosial terbukti mampu mereduksi emisi karbon melalui pengurangan laju deforestasi hutan
- Peluang target perluasan 12,7 jt ha



LPHN LANSKAP LUNANG
(PONDOK PARIAN LUNANG, LUNANG TENGAH, LUNANG)
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT



LPHN GUNUNG SELASIH
KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT



LPHN SARIAK ALAHAN TIGO
KABUPATEN SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT



LPHN KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT



Potensi pengembangan jasa lingkungan lewat karbon di wilayah Perhutanan social

Nagari	Tutupan Hutan		Pertumbuhan Presentase	
	2017	2020		
Landscape Lunang	2,901	3,102	201	6%
Gunung Selasih	2,762	3,356	594	18%
KBKA	491	542	51	19%
Sariak Alahan Tigo	2,083	2,442	359	15%

Sumber: Analisa Citra KKI Warsi Tahun 2020
Citra Lansat B Tahun 2017 dan 2020

Keterangan:



PETA TUTUPAN HUTAN PADA LOKASI PS
SUMATERA BARAT TAHUN 2020
LUAS TUTUPAN HUTAN PADA PS = 6.780 HA



Regent	Tutupan Hutan 2017	Tutupan Hutan 2020	Pertumbuhan Presentase
Landscape Lunang	2,901	3,102	6%
Gunung Selasih	2,762	3,356	18%
KBKA	491	542	19%
Sariak Alahan Tigo	2,083	2,442	15%

Pembelajaran di lapangan



Peluang dan Tantangan

- Perhutanan sosial mampu berkontribusi dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon
- Peningkatan kapasitas masyarakat, pendanaan dan pendampingan intensive hingga proses validasi dan verifikasi lapangan adalah hal yang terpenting untuk di fasilitasi
- NEK memberikan peluang bagi masyarakat mendapatkan sumber pendanaan
- Perlu melihat terkait posisi masyarakat penjaga hutan atau pengelola PS, apakah sebagai Pelaku Usaha atau hanya sekedar penerima manfaat/obyek. Bagaimana dengan posisi dan peran masyarakat pengelola PS dalam penyelenggaraan NEK

